

IPM 54-17-013



Kompol. Malvino Edward Yusticia, SH, SIK, MH, MSS
Lulusan Akademi Polisi 2006
Alumni Master Kajian Strategi Universitas Victoria
Wellington, Selandia Baru

Era Kontrainsurgensi Belum Berakhir

Bagian 2 dari 2 tulisan

Insurgensi dan Kontrainsurgensi di Beberapa Bagian Dunia

Secara signifikan, di dunia kontemporer, insurgensi meningkat dalam jumlah atau skala. Ada banyak faktor yang mendorong insurgensi menjadi global dan canggih. Tidak diragukan, insurgensi terjadi di seluruh dunia dengan berbagai motif dan tujuan, seperti ideologi, agama, dan politik. Tidak penting bagaimana pemerintah menanggapi insurgensi dan mengatasi atau mengalahkannya melalui kontrainsurgensi, konfliknya tampak menjadi persoalan dunia yang tidak terpecahkan. Alhasil, kontrainsurgensi akan terus berlanjut dan tidak

pernah berhenti. Bagian berikut akan menggambarkan beberapa insurgensi dan kontrainsurgensi di beberapa bagian dunia, yaitu di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika.

Timur Tengah

Bagian ini akan mendukung pernyataan bahwa kontrainsurgensi tidak akan pernah berhenti dengan menganalisa sejumlah insurgensi di dua negara Timur Tengah, yaitu Afganistan dan Irak. Kontrainsurgensi di kawasan-kawasan itu adalah salah satu dari operasi militer terlama dalam sejarah kontemporer AS dan sekutu Baratnya. Pada 2015 perang mengerikan berjalan selama 13 tahun. Memiliki pemahaman mengenai insurgensi itu penting untuk menelisik kompleksitas kontrainsurgensi. Bagian ini

Tidak penting bagaimana pemerintah menanggapi insurgensi dan mengatasi atau mengalahkannya melalui kontrainsurgensi, konfliknya tampak menjadi persoalan dunia yang tidak terpecahkan.

akan menunjukkan dua gagasan mengenai kontrainsurgensi; pertama bagaimana kontrainsurgensi bekerja secara efektif dan efisien, dan kedua bagaimana kepentingan nasional memainkan peran dalam kontrainsurgensi.

Pada 11 September 2001, terjadi serangan teror tak terlupakan di Kota New York ketika dua pesawat terbang menabrak World Trade Centre dan membunuh 2.753 orang. Korban merentang dari usia 2 sampai 85 dan sekitar 75-80 persen dari mereka adalah laki-laki (CNN Library, 2015). Berdasarkan investigasi, AS menunjuk bahwa serangan teror itu dilakukan oleh Al-Qaeda dan dipimpin oleh Osama Bin Laden di Afganistan. AS kemudian menyatakan perang terhadap terorisme dan bersiap untuk menyerbu Afganistan melalui operasi militer.

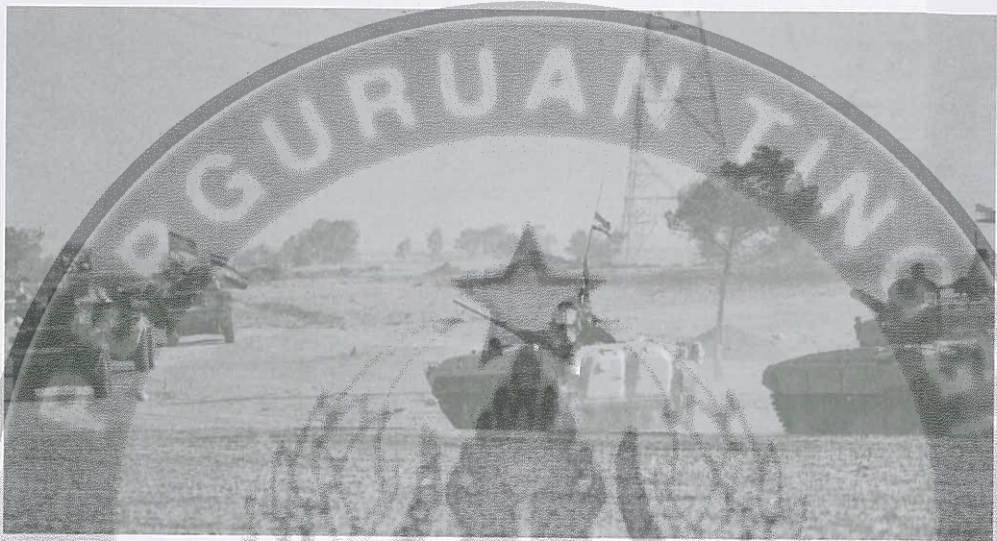
Antara 2002 dan 2008, jumlah pasukan di Afganistan meningkat dari 5.200 menjadi 30.100 pasukan (Belasco, 2009). Sebaliknya, antara 2009 dan 2014, ada penurunan pasukan pada pemerintahan Obama. Banyak orang berharap bahwa ini akan menjadi akhir invasi AS di Afganistan. Pada 2012 Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa operasi perang AS di Afganistan akan berakhir pada Desember 2014 (DeYoung, 2012). Ini hanya sebuah akhir formal, tetapi sejatinya operasi militer masih berlanjut.

Lebih jauh, pada 2014 Presiden Obama menyatakan bahwa ia berencana menarik pasukan Amerika terakhir dari Afganistan pada penghujung 2016. Pada tahun ini masih tersisa 9.800 pasukan di negeri tersebut. Pengumuman resmi mengatakan jumlahnya akan dipotong separuh pada penghujung 2015, dan pada penghujung 2016, invasi militer akan berakhir (Landler, 2014).

Meski pengurangan jumlah pasukan tampak menunjukkan akhir invasi AS di Afganistan, hal ini bukan berarti kontrainsurgensi akan berakhir dalam kenyataan. Meski ada penurunan signifikan jumlah pasukan, kualitas penggantian pasukan sebenarnya meningkat. Pasukan sekarang di Afganistan merupakan serdadu reguler, di mana nyaris 50% dari total komposisi

pasukan di negeri itu merupakan petugas aktif (Belasco, 2009). Namun, pada 2015 dan seterusnya AS tidak lagi membawa serdadu konvensional Amerika yang besar untuk membersihkan kawasan luas kaum pemberontak Afganistan, atau menjaga kampung-kampung dan kota-kota yang rapuh terkena seranga militan. Pasukan khusus Angkatan Darat, Baret Hijau, akan mengambil alih tugas di Afganistan. Baret Hijau terlatih dalam bahasa, budaya, diplomasi, perang psikologis, dan seterusnya. Mereka bekerja dengan orang setempat di Kawasan Operasi mereka (U.S. Army Website, n.d.). Tidak diragukan, Baret Hijau merupakan para pejuang Tercerdas dan paling mematikan di dunia. Mereka hanya bekerja bersama dalam sebuah tim kecil berisi 12 orang. Jadi itulah sebab jumlah besar





tidak dibutuhkan dalam kasus ini. Pasukan Khusus akan diikuti dengan CIA untuk melaksanakan serangan udara tanpa awak (drone), yang lebih efektif dan mematikan (Shear & Mazzetti, 2015).

Sebagaimana juga di Afganistan, AS melakukan kontrainsurgensi di Irak sampai saat ini. Operasi ini dimulai pada April 2003 ketika AS menggulingkan dominasi Arab Sunni saat rezim Saddam Hussein berkuasa (Hashim, 2006).

Dominasi Arab Sunni disusul dengan banyak korupsi dalam politik dan ekonomi sosial di negeri itu seperti sektor produksi minyak (Underhill, 2014). Kurun terburuk dalam rezim Saddam Hussein, yang berkuasa dari 1979 sampai April 2003 dengan sistem otoriter. Hal ini melahirkan faksi sosial di negeri itu

di mana kelompok etnis lain, yaitu Syiah dan Kurdi, tidak memiliki posisi dalam konstelasi politik selama dominasi Arab Sunni. Alhasil, ada banyak peperangan saudara di negeri itu. Sebenarnya perang saudara yang terjadi kala itu bisa dipandang sebagai insurgensi sebab kelompok-kelompok bukan penguasa beserta perang gerilyanya mencoba menggulingkan pemerintah. Hal ini menciptakan instabilitas bagi negeri itu dan barangkali bagi kawasan Timur Tengah. Situasi ini menjadi buruk sejak Saddam Hussein dituduh memiliki Senjata Pemusnah Massal. Sebagai tanggapan atas hal ini, pada April 2003 AS di bawah pemerintah Bush beserta koalisinya menjalankan operasi militer yang disebut Operasi Pembebasan Irak dengan misi menggulingkan rezim Saddam Hussein.

Namun, operasi militer bukanlah jawaban. Setelah kejatuhan Hussein, AS mencoba membangun kembali institusi-institusi pemerintahan. Orang Irak merasa mereka tidak memiliki kuasa atas negeri mereka sendiri. Seminggu setelah okupasi AS, ada unjukrasa dari orang Irak di Fallujah pada 28 April 2003, yang menunjukkan resistensi kepada invasi AS di Irak. Otoritas Koalisi Provisional (CPA) dibentuk untuk mengatasi situasi dan mengirimkan penguasa ke Irak, Paul Bremer III. Namun ini bukanlah jawaban untuk menyeimbangkan politik di negeri itu sebab banyak orang Irak bersikeras mendapatkan kedaulatan bagi pemerintahan mereka. Sebagai tanggapan atas situasi ini, pada 28 Juni 2004 kekuasaan CPA dikirim ke pemerintah Irak baru yang dipimpin oleh Ayad Allawi sebagai Perdana

Menteri dan Sheik Ghazi al-Yawer sebagai Presiden (Cordesman, 2008). Pemerintahan baru masih belum menciptakan stabilisasi di negeri itu. Alih-alih menurunkannya, insurgensi meningkat dalam jumlah dan skala. Tampaknya, sejak saat itu insurgensi dan kekacauan menjadi praktik tiada henti di Irak (Underhill, 2014). Pada 2013, operasi militer memusatkan perhatian kepada perang melawan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

Antara 2003 dan 2008, jumlah pasukan dari AS di Irak meningkat dari 67.700 menjadi 157.800 pasukan (Belasco, 2009). Seperti di Afghanistan, AS juga menurunkan jumlah pasukan di lapangan di Irak secara signifikan pada 2014 setelah penarikan mundur pasukan NATO di negeri itu pada 2011. Namun, hal itu bukan berarti bahwa operasinya



Indonesia sudah berjuang dengan banyak pemberontakan internal sejak deklarasi kemerdekaan pada 1940an sampai sekarang. Dua isu utama insurgensi ini adalah agama dan separatisme.

akan berhenti, sebab AS hanya ingin mengurangi jumlah pasukan.

Tampaknya, alasan kenapa AS menurunkan jumlah pasukan adalah untuk mencegah peningkatan jumlah pasukan yang gugur di Irak. Dengan begitu, AS memiliki dua strategi pada saat ini, yaitu menggunakan Pasukan Khusus Angkatan Darat, Baret Hijau dan Kendali Pertempuran Udara atau serangan Pesawat Tanpa Awak (The White House Office of the Press Secretary, 2014). Kehadiran Pasukan Khusus adalah untuk melatih Para Pemberontak Syria untuk membangun kekuatan yang mampu mengalahkan ISIS. Pada tiga tahun selanjutnya, AS akan melatih dan mempersenjatai lebih dari 15.000 pemberontak Syria, yang sejauh ini terlibat pertempuran antara ISIS dan juga pemerintah lokal Irak (BBC News, 2015). Lebih lanjut, menggunakan drone bisa membuat serangan udara lebih efektif dan efisien dari perspektif AS terlepas kontroversi yang disebabkan hasil tak terduga. Sebagai contoh, lebih dari seribu orang tak berdosa terbunuh dalam sebuah serangan drone

kepada 40 terduga teroris (Ackerman, 2014).

Asia Tenggara

Wacana ini menunjukkan sejumlah insurgensi dan kontrainsurgensi di dua negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Thailand. Bagian ini menunjukkan bagaimana kontrainsurgensi berlanjut untuk mengalahkan atau mengatasi keberadaan kelompok-kelompok insurgen di negara-negara multikultural.

Indonesia sudah berjuang dengan banyak pemberontakan internal sejak deklarasi kemerdekaan pada 1940an sampai sekarang. Dua isu utama insurgensi ini adalah agama dan separatisme.

Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan dengan demikian tidaklah mengherankan Islam sebagai isu agama mendominasi faktor insurgensi di negeri ini. Beberapa insurgensi berbasis Islam adalah Darul Islam (DI) yang didirikan oleh S. M. Kartosoewirjo sebagai

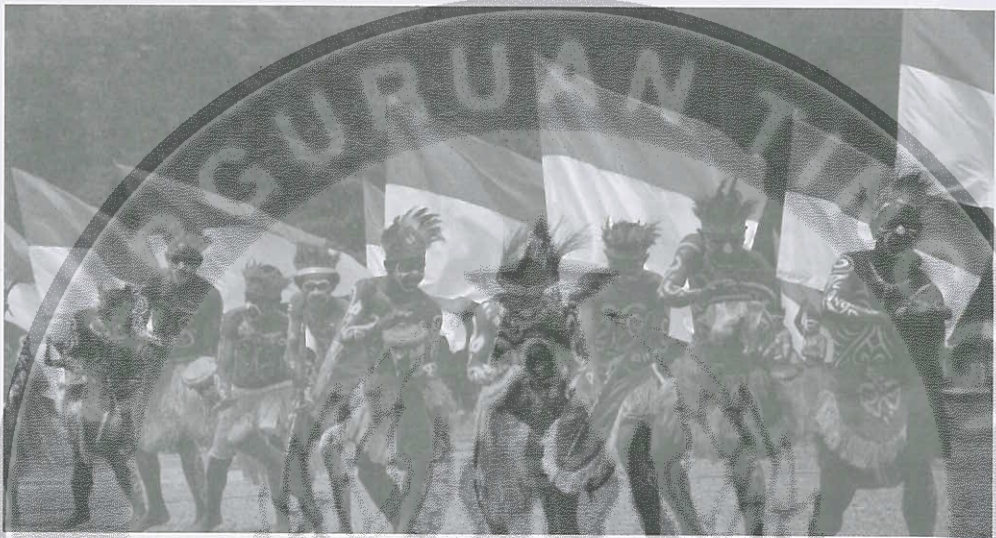
pemimpin pada 1947 (Fealy, 2007); kemudian Laskar Jihad pada 1998 di bawah kepemimpinan Ja'far Umar Thalib yang melakukan beberapa serangan di Maluku dan bagian lain di Indonesia (Sholeh, 2007); kemudian diikuti oleh Jemaah Islamiyah yang didirikan oleh Abu Bakar Baasyir di Solo pada 1999 (Fealy, 2007). Tujuan mereka adalah membentuk Negara Islam di Indonesia dan mengubah seluruh sistem pemerintahan berdasarkan hukum Syariah. Menjalankan aktivitas militer, yang diartikulasikan menjadi gerilya dan perang kota, adalah fokus kelompok-kelompok insurgen ini untuk meraih tujuan mereka.

Isu-isu insurgeni lain di Indonesia adalah separatisme, yang disebut oleh Anthony James Joes (2004) sebagai ambisi mendapatkan kekuatan politik. Insurgeni

sebelumnya yang belum terpecahkan di Indonesia adalah separatisme di Papua dan Papua Barat di bawah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemberontakan ini bermula pada 1960an ketika identitas nasional Melanesia dikembangkan dan diinternalisasi di antara orang Papua. Alhasil, mereka tidak merasa sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Hal ini diperparah oleh kurangnya perhatian dari pemerintah pusat di bidang pembangunan sosial dan ekonomi. Alih-alih mempercepat pembangunan, pemerintah Indonesia menanggapi dengan operasi militer pada penghujung 1960an di bawah rezim Suharto yang menerapkan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua (Vermonte, 2007).

Tahun 2000an bisa dianggap sebagai era baru operasi kontrainsurgeni di Indonesia.





Setelah revolusi pada 1998, Polri menjadi terpisah dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan sejak saat itu kontrainsurgensi menjadi wilayah urusan polisi. Di Indonesia, kontrainsurgensi dan kontraterorisme dilaksanakan oleh unit pasukan polisi khusus, yang disebut dengan Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Unit ini dibentuk 2003 untuk menjawab seluruh isu insurgensi dan terorisme di Indonesia. Unit ini sudah menyingkap banyak kasus terorisme di dalam negeri. Unit ini juga sudah melaksanakan banyak kerjasama internasional dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Australia, AS, dan sebagainya dalam pengertian pembangunan kapasitas dan berbagi informasi intelijen (Maharani, 2013).

Pada 2005, pemerintah Indonesia berhasil menghentikan

pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Difasilitasi oleh pemerintah Finlandia, pemerintah Indonesia dan kelompok insurgen menandatangani kesepakatan diplomatik, yang dikenal dengan "Perjanjian Helsinki". Sejak saat itu pemberontakan panjang di Aceh berakhir. Namun, masih banyak kelompok insurgen di Indonesia, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua atau Jemaah Islamiah serta kelompok teroris Islam lain. Kontrainsurgensi masih dibutuhkan sebab banyaknya insurgensi masih menjadi persoalan utama di negeri multikultural.

Insurgensi-insurgensi lain di Asia Tenggara adalah di Thailand. Setidaknya ada lima kelompok insurgen Islam dan kebanyakan insurgen berpusat di Selatan Thailand yaitu Front Koordinasi Revolusioner

Nasional Melayu Patani (atau BRN-Coordinate), Front Pembebasan Nasional Patani (BNPP), Organisasi Pembebasan Patani Bersatu (PULO), Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP), dan Front Bersatu untuk Kemerdekaan Patani (Global Security Website, n.d.). Kelompok-kelompok separatis Muslim menggunakan isu agama untuk membenarkan serangan mereka dan mengejar otonomi demi tujuan-tujuan mereka. Setelah 9/11, pemerintah Thailand memutuskan untuk bergabung dengan AS demi perang global terhadap teror dan menjalankan kontrainsurgensi melawan kelompok separatis Muslim (Pongsudhirak, 2007). Tampaknya, kelompok-kelompok insurgen tidak akan menghentikan serangan kecuali pemerintah Thailand memberi mereka otonomi dan membiarkan mereka membangun sebuah Negara Islam di Selatan Thailand. Dengan begitu, kontrainsurgensi memainkan sebuah peran penting untuk menjaga keamanan dan stabilisasi di negeri itu.

Afrika

Bagian ini akan mendukung pernyataan bahwa kontrainsurgensi berlanjut dalam bentuk berbeda dengan menganalisa sejumlah insurgensi di dua negara Afrika, yaitu Nigeria dan Sudan. Bagian ini menunjukkan bagaimana kontrainsurgensi di Afrika berbeda

dibandingkan dengan dua kawasan yang disebut sebelumnya. Tidak seperti kontrainsurgensi di Timur Tengah, yang seperti semacam invasi militer dari AS beserta sekutu-sekutu Baratnya, atau di Asia Tenggara, yang didorong oleh konflik-konflik internal, di Afrika didorong oleh kepentingan ekonomi dari negara-negara asing lain. Dengan kata lain, kontrainsurgensi menjadi cara untuk memelihara status quo di Afrika.

Terlepas hampir 40 tahun operasi militer di Nigeria, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam pengertian pemulihan keamanan di negeri itu (Akinola, *Niger Delta Crisis: The Nexus between Militants' Insurgency and Security in West Africa*, 2011). Alih-alih membaik, situasinya menjadi buruk pada awal 2000an bersama dengan "ledakan minyak" di negeri ini yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan pemasok minyak terbesar ketujuh ke Amerika Serikat (Akinola,

Kelompok-kelompok separatis Muslim menggunakan isu agama untuk membenarkan serangan mereka dan mengejar otonomi demi tujuan-tujuan mereka.



2009).

Ada sejumlah perusahaan minyak Barat di negeri ini, seperti Shell dan Chevron. Produksi minyak memberi lebih dari 80 persen pendapatan bagi negara. Namun, lemahnya kepemimpinan politik dan korupsi dalam mengelola ekonomi dan keuangan negara mengartikan kemiskinan di negeri ini bertahan. Alhasil, kondisi-kondisi ini melahirkan kelompok-kelompok insurgen Islam untuk menjalankan sejumlah serangan dan perang iregular di Nigeria (Akinola, 2011). Kelompok insurgen Islam terbesar dan paling mematikan di Nigeria pada masa kini adalah Boko Haram, yang aktif sejak 2009 (Institute for Economics and Peace, 2014).

Untuk menjawab aktivitas kelompok-kelompok insurgen ini, pemerintah Nigeria menghabiskan

\$100 miliar untuk membeli senjata dan semua uang besar ini berasal dari pendapatan produksi minyak (Mail dan Guardian Afrika, 2015). Seluruh senjata militer digunakan untuk menjalankan operasi kontrainsurgensi di negeri ini. Tamapknya, seluruh fokus pemerintah diambil untuk melaksanakan kontrainsurgensi untuk memerangi Boko Haram.

Selama dua dasawarsa terakhir, AS merupakan pemasok senjata terbesar bagi Afrika. Namun, menurut sebuah kajian dari Stockholm International Peace Research Institute pada 2014, Cina melalui kebijakan “senjata untuk minyak”-nya mengambil alih posisi kemudian disusul oleh AS dan Rusia sebagai tiga besar pemasok senjata utama bagi Nigeria (Mail dan Guardian Afrika, 2015). Alhasil,

Cina mendapatkan akses atas minyak murah di Nigeria (Alessi & Xu, 2015). Dalam pengertian tersebut, kehadiran Cina menjadi ancaman bagi AS beserta sekutu-sekutu Baratnya disebabkan AS juga memiliki kepentingan yang sama kepada minyak mentah.

Baik Cina dan AS tampak menggunakan bisnis senjata mereka demi status quo mereka di Nigeria. Kehadiran mereka membuat akses mudah kepada senjata ringan (Small Arms Survey, 2014). Alhasil, kelompok-kelompok insurgen seperti Boko Haram dengan mudah mendapatkan senjata melalui pasar gelap dan mencuri cadangan senjata militer Nigeria untuk sumber-sumber persenjataan mereka. Persaingan antara Cina dan AS tampak membuat kontrainsurgensi kepada perang tanpa akhir.

Sebagaimana juga Nigeria, lemahnya kualitas pemerintahan melahirkan kelompok-kelompok insurgen yang membawa senjata mereka demi memerangi pemerintah Sudan. Selama lebih dari dua dasawarsa pemerintah menghadapi sejumlah serangan dari kelompok-kelompok insurgen yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri dan kebebasan beragama. Lebih dari dua juta orang mati di Sudan, dan lebih dari empat juta orang meninggalkan rumah-rumah mereka sebagai akibat dari perang saudara. Kebanyakan penduduk sipil yang mati—perempuan dan anak-anak—yang mati karena kelaparan dan penyakit (Wolf, 2001).

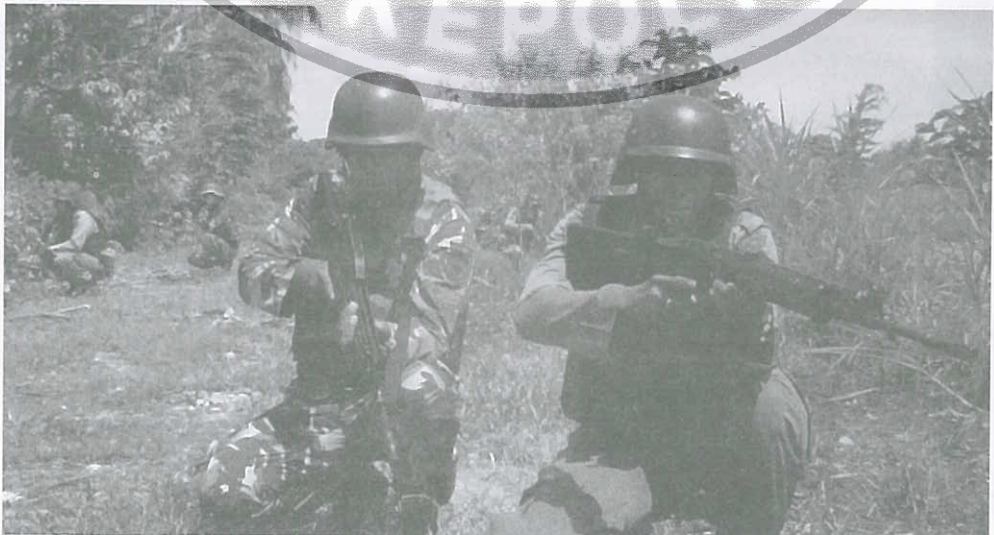
Lebih jauh, Sudan merupakan salah satu pemasok minyak terbesar di dunia. Sebagai contoh, pada 2005, 6,6 juta ton minyak mentah diekspor



oleh Sudan ke Cina. Sekitar 5,2 persen total impor minyak Cina di tahun itu dan Cina bisa melakukannya karena negara tersebut memiliki saham 40 persen dalam konsorsium minyak internasional terbesar (Chang, 2007). Sebagai imbalan, Sudan mendapat senjata dari Cina. Namun, Cina bukanlah satu-satunya pemain yang tertarik kepada minyak. Bersama AS dan sekutu-sekutu Baratnya, beberapa kelompok insurgen di Sudan juga berperang demi minyak, terutama sejak penghujung 1990an atau awal 2000an (Wolf, 2001).

Menurut Database Statistik Perdagangan Komoditas PBB (UN Comtrade), Cina merupakan negara pemasok senjata ringan terbesar ke Sudan, dengan 58 persen senjata kecil dan ringan, amunisi, dan 'senjata konvensional' dikirim dari Cina (Small Arms Survey, 2014)

sedangkan AS dan Rusia berkontribusi atas sisanya (Mail dan Guardian Afrika, 2015). Menurut inspeksi lapangan dari survei internasional—berbasis di Geneva, Swiss—di Sudan, ada berbagai perlengkapan Cina yang besar: termasuk senapan laras, senjata mesin berat bertujuan umum, pelontar roket berpola RPG-7, peluncur granat otomatis, misil antitank, berbagai jenis roket, dan amunisi kaliber kecil. Yang mengejutkan, sebagaimana Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), pemberontak dan milisi tribal di Sudan juga memiliki berbagai senjata Cina (Small Arms Survey, 2014). Dalam pengertian itu, Cina tidak terlalu peduli dengan stabilitas di Sudan. Negara ini tidak terlalu peduli kemana senjata pergi selama mereka bisa menukarnya dengan minyak mentah.



Hubungan antara minyak, senjata, dan persaingan Cina dan AS di negara-negara Afrika menunjukkan sebuah gagasan bahwa kontrainsurgensi bisa digunakan sebagai cara untuk mempertahankan status quo negara-negara besar untuk meraih kepentingan mereka di sebuah kawasan konflik. Semakin tidak stabil suatu kawasan semakin banyak keuntungan yang bisa diambil. Dengan kata lain, negara-negara besar yang memiliki kepentingan di Afrika (mis. Cina, AS) tampak menginginkan kontrainsurgensi terus dijalankan, sebab dengan cara itu mereka bisa menukar senjata dengan minyak murah. Hal ini berarti bahwa kontrainsurgensi akan terus terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang atau bisa dibilang tidak akan pernah berhenti.

Penutup

Melihat sejumlah insurgensi dan kontrainsurgensi di beberapa bagian dunia, setidaknya ada empat gagasan yang bisa diambil. Pertama, kontrainsurgensi bagi AS tidak berhenti disebabkan penurunan pasukan lapangan, sebab AS hanya ingin mengurangi kehilangan tentara dalam peperangan. Tentu saja, hal ini mengubah metode dari konvensional ke lanjutan dan dari kuantitas ke kualitas. Penggunaan Baret Hijau sebagai Pasukan Khusus dan Kendali Pertempuran Udara atau serangan

kontrainsurgensi bisa digunakan sebagai cara untuk mempertahankan status quo negara-negara besar untuk meraih kepentingan mereka di sebuah kawasan konflik.

udara Drone CIA merupakan contoh-contoh bagus untuk menunjukkan perubahan metode. Sebagai tambahan, AS mengajarkan para pemberontak Syria selama tiga tahun selanjutnya demi memerangi militan Islam. Dalam pengertian tersebut, AS masih khawatir akan kelompok-kelompok insurgen, yang karenanya mereka melaksanakan pelatihan militer sebagai bagian dari kontrainsurgensi.

Kedua, kepentingan nasional negara-negara memainkan peran penting dalam operasi kontrainsurgensi. Sebagai contoh, ketika AS merasa terancam disebabkan terorisme atau isu WMD, negara ini menjalankan operasi militer tetapi ketika ancaman dirasa sudah teratasi AS tampak menghentikan operasi militernya. Namun, hal ini tidak mengartikan bahwa AS akan menghentikan kontrainsurgensi. AS masih

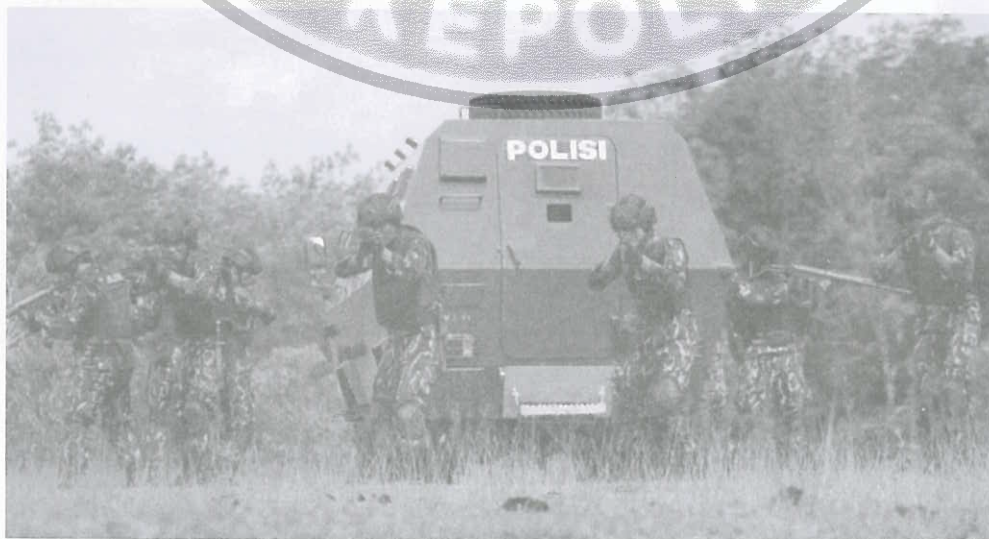
melindungi kepentingan nasionalnya melalui kontrainsurgensi.

Ketiga, insurgensi sangat mungkin terjadi di negara-negara multikultural, yang berisi sejumlah agama dan budaya. Dengan begitu, kontrainsurgensi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilisasi di negara-negara multikultural. Kontrainsurgensi dalam cara ini bukanlah satu-satunya wilayah urusan militer tetapi membutuhkan gabungan upaya sipil dan pasukan militer.

Keempat, kontrainsurgensi bukanlah perang tidak adil. Tentu saja hal ini sangat rumit. Hal ini bisa digunakan untuk menjaga status quo bagi negara-negara besar yang memiliki kepentingan di sebuah kawasan konflik. Sebuah contoh

bagus adalah bagaimana Cina dan AS menggunakan kontrainsurgensi untuk menjaga status quo di negara-negara Afrika dan mendapatkan minyak murah melalui bisnis senjata militernya.

Kontrainsurgensi beserta kompleksitasnya tampaknya menjadi perang yang tidak akan pernah berhenti. Ia bisa saja "berhenti" bagi AS melalui penurunan jumlah pasukan, tetapi tidak sungguh-sungguh berhenti dalam kenyataan. Selama peperangan iregular ada, kontrainsurgensi akan ada juga. Dengan begitu, tampaknya era kontrainsurgensi tidaklah berhenti disebabkan ia akan berlangsung untuk kurun waktu yang cukup panjang dan akan tetap terjadi di dunia. (*)



Resensi buku

Judul: Demokratisasi Pemolisian dan Strategi Keluar dari Zona Nyaman

Penulis: Chrysnanda DL

Penerbit: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian

Cetakan: 2016

Halaman: 1-xiv+478



Keluar dari Zona Nyaman Menuju Demokratisasi Kepolisian

Sosok Chrysnanda Dwilaksana merupakan polisi yang rajin menulis. Ia dikenal sebagai cendekiawannya polisi. Perwira berpangkat Komisaris Besar ini merupakan pribadi langka. Tidak banyak polisi seperti dia, yang rajin menulis dan memiliki prestasi segudang. Kebanyakan polisi bahkan berpikiran teori dan konsep itu urusannya akademisi dan kampus. Tapi, Chrysnanda melawan arus itu. Ia percaya bahwa teori dan konsep sangat dibutuhkan untuk melanjutkan reformasi Polri.

Buku berjudul Demokratisasi Pemolisian dan Strategi Keluar dari Zona Nyaman ini merupakan kumpulan tulisan Kombes Pol. Chrysnanda yang terdiri



dari 35 tulisan. Banyaknya tulisan itu kemudian dikelompokkan ke dalam enam bagian yaitu Reformasi Polri Belum Selesai; Polisi Ideal adalah Polisi Sipil yang Demokratis; Ilmu Kepolisian Berlandaskan Demokrasi; Beberapa Permasalahan Pemolisian Dewasa Ini; Pemolisian Komunitas dan Implementasinya; serta Kepemimpinan dan Manajerial yang Demokratis.

Pada bagian pertama, buku ini membahas reformasi Polri. Dalam tesisnya, Chrysnanda menyatakan bahwa reformasi Polri belum selesai, disebabkan demokrasi di Indonesia yang menuju masyarakat sipil masih terus berproses. Argumentasinya adalah pemolisian perlu memperhatikan konteks masyarakat majemuk di Indonesia, otonomi daerah, dan memasukkan muatan budaya lokal ke dalam kurikulum Sekolah Polisi Negara. Kuatnya akar

militer semasa Orde Baru membuat budaya tersebut harus dihapuskan dalam pemolisian di Indonesia. Suka tidak suka, menurut Chrysnanda, budaya militer warisan Orde Baru masih melekat dalam pemolisian. Hal itu menjadi salah satu penghambat reformasi budaya Polri.

Bagian kedua membahas tentang sosok polisi ideal. Sosok polisi ideal ini harus diwujudkan melalui reformasi Polri. Caranya dengan mengubah paradigma kepolisian yang tadinya kental dengan budaya militer menjadi paradigma polisi sipil. Bagi Chrysnanda, polisi harus menghormati demokrasi dan prosesnya melalui pembangunan institusi Polri yang profesional dan demokratis, penerapan pemolisian komunitas, dan perubahan budaya polisi serta pencitraannya. Chrysnanda menyatakan, pemolisian harus memiliki karakter sipil yang

memahami demokrasi.

Pada bagian ketiga, Chrysnanda memiliki tesis bahwa ilmu kepolisian harus berlandaskan demokrasi. Tanpa pemahaman akan demokrasi, maka agak sulit ilmu kepolisian berkembang. Terlebih budaya militer yang mengakar kuat selama Orde Baru sulit dihapuskan. Diperlukan keluar dari zona nyaman bagi polisi untuk bisa berpikir keluar dari kotak.

Bagian keempat tampak bahwa Chrysnanda mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, pemolisian saat ini menghadapi masalah-masalah seperti ujaran kebencian, intoleransi, konflik sosial dan peningkatan kejahatan jalanan. Usulan Kombes Chrysnanda cukup radikal: masyarakat harus mau dan berani mengawasi polisi. Radikal, disebabkan selama ini masyarakat enggan berurusan dengan polisi, terlebih mengawasinya.

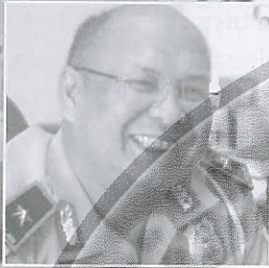
Bagian kelima membahas persoalan pemolisian komunitas. Secara padat Chrysnanda menyampaikan wacana pemolisian komunitas dan memberi strategi implementasinya. Dengan membandingkan penerapan pemolisian komunitas di Jepang, Chrysnanda membawa wawasan baru mengenai implementasi pemolisian komunitas di Indonesia.

Pada bagian keenam, semua gagasan Kombes Pol. Chrysnanda disimpulkan dengan perlunya

Kepolisian harus mampu keluar dari zona nyaman menuju demokratisasi. Bagi Chrysnanda sumber daya manusia termasuk polisi merupakan aset utama bangsa Indonesia.

dukungan kepemimpinan dan pengelolaan yang demokratis di kalangan Polri. Selain terus melanjutkan reformasi budaya Polri, salah satu wewenang polisi yang dikritisi adalah diskresi dan berbagai penyimpangannya. diskresi perlu diatur sehingga tidak ditafsirkan secara sepihak. Menurut Chrysnanda, dibutuhkan pedoman pembatasan diskresi.

Pada akhirnya, buku ini menyatakan tesis penting. Kepolisian harus mampu keluar dari zona nyaman menuju demokratisasi. Bagi Chrysnanda sumber daya manusia termasuk polisi merupakan aset utama bangsa Indonesia. Polri harus dibangun secara demokratis menjadi polisi sipil yang profesional. Sebab polisi bukan tentara, maka zona nyaman yang selama ini disematkan kepada kepolisian harus diubah. Polisi adalah sipil yang kebetulan saja diberi seragam. (*)



Brigjen. Pol. DR. Chryshnanda DL, MSi
Direktur Keamanan dan Keselamatan
Korlantas Polri

Diskresi, Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution

Chryshnanda DL

Jprj-17-0019

Memahami Restorative Justice (RJ), Alternative Dispute Resolution (ADARI) dan diskresi bagi polisi sebagai penegak hukum dan keadilan dipahami dari filosofi hukum dan keadilan untuk kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Hukum dibuat demi kemanusiaan, yang ditujukan untuk mendapatkan keadilan. Keadilan di sini menunjukkan kekuatan bagi memanusiakan manusia. Hukum adalah cermin dari peradaban. Tatkala hukum tebang pilih (tajam ke bawah tumpul ke atas) dijalankan, maka hukum akan jadi